

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pengukuran kinerja dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 merupakan peraturan hukum pertama yang mengatur tentang pelaporan kinerja pemerintah Indonesia. Dalam kerangka tersebut, Presiden mengarahkan anggota Kabinet untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja lembaga sebagai bentuk tanggung jawab mereka dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Pertanggungjawaban kinerja lembaga ini diwujudkan melalui penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan (LAKIP) kepada Presiden.¹

Pengukuran kinerja adalah salah satu elemen penting dalam organisasi, termasuk di sektor publik. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas suatu organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Di sektor publik, pengukuran kinerja dilakukan untuk memastikan kepatuhan. Pertama, tujuan pengukuran kinerja di sektor publik adalah untuk

¹Cris Kuntadi And Galih Cheria Puspita, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kementerian/Lembaga: Sistem Pengukuran Kinerja, Dukungan Organisasi Dan Faktor Individual', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4.2 (2022), Pp. 189–98 <<https://doi.org/10.31933/jimt.v4i2>>.

meningkatkan kinerja pemerintah. Kedua, indikator kinerja di sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan. Ketiga, pengukuran kinerja di sektor publik bertujuan untuk mencapai akuntabilitas publik dan meningkatkan komunikasi dalam organisasi.² Pengukuran kinerja adalah evaluasi pencapaian kegiatan organisasi berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan serta standar dan standar. Informasi mengenai pengukuran ini juga dapat menjadi acuan untuk menetapkan tolak ukur kinerja di masa mendatang. Nilai target periode berikutnya juga bergantung pada hasil evaluasi kinerja.³

Mengukur kinerja pemerintah daerah berdasarkan anggaran belanja pendapatan daerah (APBD) dapat diukur dengan menggunakan konsep *value for money*. 'Value for Money' adalah konsep manajemen organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen kunci: ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi adalah perolehan input dengan kualitas dan kuantitas yang konstan pada harga terendah. Perekonomian bergantung pada sejauh mana organisasi

²Indrayani Indrayani And Khairunnisa Khairunnisa, 'Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe: (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6.1 (2019), P. 1, Doi:10.29103/Jak.V6i1.1820.

³Susi Maryanti And Agus Munandar, 'Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019 Jimea | Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)', *Jimea | Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5.3 (2021), 2886–99.

sektor publik mampu menghindari pengeluaran yang boros dan meminimalkan penggunaan sumber daya input. Efisiensi berarti mencapai keluaran maksimum dengan masukan tertentu, atau mencapai keluaran tertentu dengan masukan minimum. Efektivitas adalah sejauh mana suatu program mencapai hasil dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sederhananya, efektivitas adalah perbandingan hasil dan hasil.⁴ Peran anggaran dalam suatu organisasi sangatlah penting. Hal ini dikarenakan anggaran tidak hanya merupakan alat untuk merencanakan alokasi sumber daya keuangan, tetapi juga berguna untuk komunikasi, koordinasi, pemantauan, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.

Anggaran merupakan bentuk pelayanan pemerintah yang diwujudkan dalam mata uang rupiah dalam jangka waktu satu tahun. Anggaran digunakan untuk menentukan tingkat pengeluaran, mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, mengesahkan pengeluaran di masa depan, mengembangkan ukuran kinerja standar, memotivasi karyawan, dan memantau kinerja. Anggaran berfungsi sebagai alat penyesuaian satuan.⁵

⁴ Polii, Saerang, And S J Tangkuman, 'Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money', *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 8.4 (2020), 781–88.

⁵Nurhumaerah, Arifuddin Mas'ud, And Ummy Kalsum, 'Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Pekerjaan

Penganggaran berbasis hasil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang menjelaskan bahwa rencana kerja dan anggaran dibuat atas dasar pekerjaan yang harus diselesaikan, atau berdasarkan hasil. Pernyataan legislatif menyatakan bahwa penganggaran berbasis hasil merupakan upaya untuk memperbaiki proses penganggaran sektor publik. Dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.⁶

Dinas pekerjaan Umum merupakan sebagai dinas yang bergerak dalam bidang tersebut mempunyai peran vital dalam pembangunan nasional dimana sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan pembangunan infrastruktur perkotaan, dan memanfaatkan sumber dana, sumber daya manusia, serana dan prasarana yang ada dengan baik,serta dengan melaksanakan tugas seoptimal mungkin. Infrastruktur yang ada di kota memiliki keterkaitan yang sangat kuat demi kesejahteraan sosial kualitas lingkungan dan terhadap proses pertumbuhan ekonomi di kota.⁷

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu merupakan salah satu dinas yang mempunyai

Umum Dan Penataan Ruang Kota Kendari', *Indonesian Journal Of Management And Accounting (Jima)*, 4.2 (2023), Pp. 221–35.

⁶Akbar Syaiful Dendy, 'Implementation Of Performance-Based Budgeting', *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi* , 2.1 (2018), Pp. 36–44.

⁷Tatan Sukwika, 'Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah Di Indonesia', *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6.2 (2018), P. 115, Doi:10.14710/Jwl.6.2.115-130.

fungsi dan peranan dalam proses penataan infrastruktur pembangunan. Dalam penataan infrastruktur tersebut dibutuhkan kualitas kinerja yang baik agar dapat mencapai tujuan.⁸Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dalam pencapaian kinerja sasaran yang diutamakan Adalah di dalam infrastruktur di Kota Bengkulu yang salah satunya pembangunan jalan yang dijabarkan dalam bentuk program atau kegiatan yang ada di Dinas untuk melaksanakan program atau kegiatan dinas tersebut di perlukan Anggaran yang cukup besar sehingga hasil dari program kegiatan tersebut dapat dinikmati Masyarakat. Terwujudnya prasarana jalan yang baik merupakan salah satu kebutuhan yang vital bagi masyarakat. Terciptanya pembangunan jalan sehingga dapat merata dan dinikmati oleh masyarakat tentu harus didukung oleh peran serta pemerintah dalam menyediakan anggaran yang memadai untuk membiayai program pembangunan tersebut. Pemerintah melalui program kerjanya kini diharapkan mampu menjawab berbagai tuntutan masyarakat terkait pembangunan jalan rusak. Hal ini menambah tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

⁸Wahyu Ishak Marzuki, Herlina Latipa Sari, And Yupianti Yupianti, 'Clustering Kualitas Kinerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bengkulu', *Jurnal Media Infotama*, 19.2 (2023)..

Bengkulu, termasuk kesediaan agar pelayanan yang diberikan dievaluasi.⁹

Berdasarkan observasi awal salah satu pekerjaan dinas PUPR Kota Bengkulu pada tahun 2023 pembangunan 3 ruas jalan yaitu jalan hibrida, jalan sungai rupa, dan jalan kalimantan dan Berdasarkan observasi lapangan bahwasanya jalan Hibrida sudah lama rusak dalam kategori berlobang yang parah sehingga menimbulkan air tergenang dan mengakibatkan banyak kendaraan roda 2(bemotor) mengalami kecelakaan, pada jalan sungai rupa juga mengalami rusak parah seperti dibagian jembatan lobang yang sangat banyak kedalaman lobang bisa mencapai 10-15 cm sehingga membuat pengendara sering tergelincir dan macet jika hari hujan, dan pada jalan kalimantan yang bergelombang,retak dan belum memiliki siring jalan maka dari itu jalan tersebut tidak menyerap air saat hujan yang mengakibatkan banjir mencapai betis orang dewasa.¹⁰

Secara dokumentasi bahwa kinerja yang dilakukan oleh dinas PUPR sudah baik, karena realisasinya lebih kecil dari anggaran tetapi hal ini belum tentu menjelaskan apakah anggaran itu bisa dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomi adalah perolehan input dengan kualitas dan

⁹ Dinas Pupr Kota Bengkulu, “Progres Perbaikan Jalan Hibrida”, 27 Maret 2023, < <https://dpupr.bengkulukota.go.id>.>

¹⁰ Siberspace,” Akhir Tahun 2023 Di Kota Bengkulu Dipastikan Jalan Mulus”, 30 September 2023, <<https://siberspace.id/Akhir-Tahun-2023-Di-Kota-Bengkulu-Di-Pastikan-Mulus>>

kuantitas yang konstan pada harga terendah. Perekonomian bergantung pada sejauh mana organisasi sektor publik mampu menghindari pengeluaran yang boros dan meminimalkan penggunaan sumber daya input. Efisiensi berarti mencapai keluaran maksimum dengan masukan tertentu, atau mencapai keluaran tertentu dengan masukan minimum. Efektivitas adalah sejauh mana suatu program mencapai hasil dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sederhananya, efektivitas adalah perbandingan hasil dan hasil.¹¹

Fenomena yang terjadi pada Dinas PUPR Kota Bengkulu yaitu penulis ingin melihat lebih jauh penilaian secara ekonomis, efisien, dan efektif itu dilihat dari data yang ada.

Tabel 1.1

Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Peningkatan Jalan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bengkulu

No.	Nama Jalan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Hibrida	10.000.000.000	9.811.863.000	98,11%
2.	Sungai Rupat	5.000.000.000	4.935.450.000	987,09%
3.	Kalimantan	4.000.000.000	3.954.000.000	988,5%

¹¹ Polii, Saerang, And Tangkuman. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 8.4 (2020), 781–88.

	Total anggaran perbaikan Dinas PUPR	19.000.000.000	18.701.313.000	98,427%
--	--	----------------	----------------	---------

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan anggaran perbaikan 3 ruas jalan pada jalan hibrida, jalan sungai rupa, dan jalan kalimantan pada Dinas PUPR Kota Bengkulu tahun 2023.

Penulis menarik kesimpulan dari fenomena ini, maka mendorong penulis mengadakan penelitian bagaimana kinerja dan pelaksanaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu pada bidang perencanaan jika diukur dengan konsep 3E, ekonomis, efisien dan efektif. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengukuran Kinerja Anggaran Pada Dinas PUPR Kota Bengkulu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam**

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Adalah:

1. Bagaimana kinerja anggaran pada dinas PUPR Kota Bengkulu menggunakan metode *Value For Money*
2. Bagaimana kinerja anggaran pada dinas PUPR Kota Bengkulu ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja anggaran pada dinas PUPR Kota Bengkulu ditinjau dari metode *Value For Money*.
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja anggaran pada dinas PUPR Kota Bengkulu ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari dua yakni :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan penelitian selanjutnya dan bermanfaat secara teori maupun mengaplikasikan mengenai Pengukuran Kinerja Anggaran dalam perbaikan jalan pada dinas PUPR kota Bengkulu.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Analisis pengukuran kinerja anggaran dalam perbaikan jalan , dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan pengukuran kinerja anggaran dalam perbaikan jalan.
- b. Memberikan suatu informasi kepada peneliti berikutnya dalam pembuat karya ilmiah yang lebih baik (sempurna)

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan Rismawati yang berjudul “Analisis Pengukuran Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan Metode *Value For Money* Pada Dinas PU. Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana kinerja atas pelaksanaan anggaran belanja Pada Dinas PU. Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan jika diukur dengan menggunakan metode *Value for Money*. Tujuannya ialah untuk mengetahui kinerja atas pelaksanaan anggaran belanja dengan menggunakan metode Value for Money Pada Dinas PU. Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif, tempat penelitian Pada DinasPU. Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, data yang digunakanialah data primer dan skunder, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, analisis data ialah kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis yang diuarikan mengenai kinerja anggaranbelanja pegawai tahun 2017-2018 Pada Dinas PU. Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, tidak ekonomis. Dan pada tahun 2019 berjalanekonomis. Untuk belanja barang dan jasa tahun 2017 tidak ekonomis, sedangkantahun 2018-2019

ekonomis. Untuk belanja modal dari tahun 2017-2019 kriterianya ekonomis. Dari segi efisiensi dari tahun 2017-2019 tidak efisien dan dari segi efektivitas tahun 2017 efektif tetapi tahun 2018-2019 tidak efektif.¹²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Febrianty Milenia, Jojo Lisbet Sibarani, Akmal Hidayat yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran sebagai Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran sebagai pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara tahun 2015–2019. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif analitik. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara tahun 2015–2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, rasio efektivitas Kabupaten/Kota di seluruh Sumatera Utara tahun 2015–2019 memiliki rata - rata kategori efektif hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan adalah baik, sedangkan rasio efisiensi Kabupaten/Kota di

¹²Rismawati, ‘Analisis Pengukuran Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan Metode Value For Money Pada Dinas Pu. Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan’, *Skripsi: Universitas Tridinanti Palembang*, 2020.

seluruh Sumatera Utara tahun 2015–2019 memiliki rata – rata kategori sangat efisien hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan adalah baik.¹³

3. Penelitian yang dilakukan oleh c.susi maryanti dan agus munandar yang berjudul “ analisis value for money untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota surabaya tahun anggaran 2015-2019 “ Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat ekonomis, tingkat efisiensi dan efektivitas keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2015- 2019 dengan memakai analisis value for money. Penelitian menggunakan data sekunder dari situs website Pemerintah Kota Surabaya dan website Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Hasilnya penelitian ditinjau dari tingkat ekonomis adalah bahwa pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 Pemerintah Kota Surabaya berhasil mencapai tingkat ekonomis kinerja antara 80% sampai 90% dengan kriteria cukup ekonomis. Kondisi tahun 2019 meningkat menjadi 92,24% yang berarti tingkat ekonomisnya menurun menjadi kategori kurang ekonomis. Dari segi efisiensi

¹³ Annisa Febrianty Milenia, Jojo Lisbet Sibarani, And Akmal Hidayat, ‘Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Sebagai Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara’, *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 5.2 (2022), Pp. 105–13, Doi:10.51510/Jakp.V5i2.986.

hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kurang efisien pada tahun 2015 dan tahun 2017 dan tidak efisien pada tahun 2016, 2018 dan 2019. Rata-rata tingkat efisiensi selama 5 tahun adalah 101.18% yang artinya masuk kategori tidak efisien. Hasil perhitungan tingkat efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya pada tahun 2015 adalah efektif sebesar 99.65%, sedangkan untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 masuk dalam kategori sangat efektif yaitu berkisar antara 100.37% sampai dengan 101.63%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya dapat dikatakan sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan dengan tingkat efektivitas rata-rata adalah sebesar 100.88%.¹⁴

4. Penelitian yang dilakukan Yuni Purwadi yang berjudul “Analisis pengukuran kinerja anggaran pada dinas PU bina marga dan pengairan kabupaten blitar”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja anggaran dinas PU bina marga dan pengairan kabupaten blitar ditinjau dari Value for money. Adapun pengukuran Value For Money terdiri dari 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas). Dalam penelitian ini, pengukuran nilai

¹⁴ Maryanti And Munandar.

ekonomi, menggunakan perbandingan realisasi biaya dengan anggaran biaya dan melalui wawancara, nilai efisiensi menggunakan perbandingan output dan input dari data LAKIP Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar, sedangkan nilai efektivitas dihitung berdasarkan perbandingan nilai outcome dan output. Adapun data yang dianalisis adalah program kegiatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi mulai tahun 2007 sampai dengan 2012. Hasil penelitian ini dapat dikatakan ekonomis jika hasil dari perhitungannya menunjukkan kurang dari 100%, untuk rasio efisien dapat dikatakan efisien jika hasilnya menunjukkan nilai lebih dari 100%, sedangkan rasio efektivitas dapat dikatakan efektif jika hasil perhitungannya menunjukkan nilai mendekati 100%. Adapun perhitungan rasio ekonomi pada tahun anggaran 2007 sampai dengan 2012 adalah sebesar 99,45%, 97,97%, 98,29%, 98,25%, 98,64% dan 97,99%. Perhitungan rasio efisiensi pada tahun anggaran 2007 sampai dengan 2012 masing-masing sebesar 100,55%, 102,07%, 101,74%, 101,78%, 101,38% dan 102,05%. Sedangkan untuk rasio efektivitas berdasarkan LAKIP pada tahun anggaran 2007 sampai dengan 2012 adalah masing-masing sebesar 100%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran Dinas PU Bina

Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar terhadap program dan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi sudah ekonomis dan efisien, tetapi masih belum efektif. Adapun saran yang diberikan penulis agar kinerja dinas bernilai efektif adalah peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang ada di Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar.¹⁵

5. Penelitian yang dilakukan Abdul Hamid, Ilyas Lamuda yang berjudul “Evaluation of financial performance through approach to value for money” The purpose of this study is to test and analyze the effect of the element of value for money which consists of economics, efficiency, the effectiveness of the financial performance of the Marine and Fisheries Office of Sidoarjo Regency. The analytical tool used in this study is using multiple linear regression. The results of the study show that element value for money consists of economics, efficiency, influential effectiveness together with the financial performance of the Department of Marine and Fisheries of Sidoarjo Regency. The economic value of value for money influences the financial performance of the Sidoarjo Regency Marine and Fisheries Office, the efficiency value of value for money influences the financial

¹⁵ Yuni Purwadi And Retno Murni Sari, ‘Analisis Pengukuran Kinerja Anggaran Pada Dinas PU Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Blitar’, *Riset Mahasiswa Ekonomi*, 2.2 (2015), Pp. 259–81.

performance of the Sidoarjo Regency Marine and Fisheries Service. Test the coefficient of determination of R^2 obtained is 0.701 or 70.1% and the remaining 29.1% is explained by other variables outside of this research model.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti penelitian ini, maka sistematika pembahasan disusun menjadi lima sub bab yaitu sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | pendahuluan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan. |
| BAB II | membahas tentang Kajian Teori yaitu kinerja, pengukuran kinerja, pengukuran value for money, kinerja anggaran, kinerja dalam pandangan islam, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. |
| BAB III | metode penelitian membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, waktudan lokasi |

¹⁶ Abdul Hamid And Ilyas Lamuda, 'Evaluasi Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money', *Gorontalo Accounting Journal*, 2.1 (2019), P. 31, Doi:10.32662/Gaj.V2i1.556.

penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, sumber data dan pengambilan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV

hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

BAB V

penutup pada bab ini dijelaskan kesimpulan dan saran.

